

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
TUDUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM ALFATHONI

2110113043

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg: 19/PK.IV/I/2026

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN
TUDUHAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH**

*(Muhammad Ilham Alfathoni, 2110113043, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 82 Halaman + x, 2026)*

ABSTRAK

Tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan merupakan masalah serius apabila dibiarkan. Modus operandi yang digunakan pelaku melibatkan ancaman kekerasan dan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan jika tuntutan tertentu tidak dipenuhi. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polsek Pauh? 2. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek pauh? 3. Bagaimanakah upaya kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris melalui studi di Polsek Pauh dan wawancara dengan Panit I Polsek Pauh, Ketua dan Penasehat Kerapatan Adat Nagari serta 3 korban tindak pidana pemerasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dilakukan dengan cara : adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, mempunyai alat bukti setidaknya 2 bukti permulaan, gelar perkara, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan penuntutan di Pengadilan. Kasus yang menimpa korban merupakan murni tindak pidana pemerasan, dalih pembayaran “denda adat” yang digunakan oknum pemuda bukan bagian dari penegakan hukum adat, karena tujuannya semata-mata memperoleh uang melalui pemerasan. 2. Faktor penghambat penegakan hukum: Faktor penegak hukum, yakni kurang baiknya implementasi di lapangan, Faktor kebudayaan, yakni norma kepatutan dan adat Minangkabau kerap disalahpahami sehingga pemerasan dengan dalih “denda adat” dianggap wajar, dan Faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerasan. 3. Upaya kepolisian meliputi langkah preventif berupa patroli, penyuluhan, pembukaan loket konsultasi, penempatan bhabinkamtibmas, dan kerja sama dengan organisasi dan lembaga, serta upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP dan UU Kepolisian, termasuk penahanan pelaku untuk memastikan proses hukum berjalan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Tindak Pidana Kesusilaan, Polsek Pauh

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF EXTORTION
ACCOMPANIED BY ALLEGATIONS OF COMMITTING AN INDECENT
ACT WITHIN THE JURISDICTION OF PAUH SECTOR POLICE**

(Muhammad Ilham Alfathoni, 2110113043, Faculty of Law, Andalas University,
82 Pages + x, 2026)

ABSTRACT

The criminal act of extortion accompanied by allegations of committing an indecent act constitutes a serious issue if left unaddressed. The perpetrators' modus operandi involves threats of violence and accusations of committing an immoral act should certain demands remain unmet. The police bear responsibility for preventing and prosecuting such crimes. Based on this background, the research raises the following questions: (1) How is law enforcement against extortion accompanied by allegations of committing an indecent act carried out within the jurisdiction of Pauh Police Sector? (2) What factors hinder law enforcement in such cases within the same jurisdiction? (3) What measures are undertaken by the police to overcome these obstacles? The research employs an empirical juridical method through a study at Pauh Police Sector and interviews with the Head of Criminal Investigation Unit (Panit I), the Chairman and Advisor of the Nagari Customary Council, and three victims of extortion. The findings indicate that (1) law enforcement is conducted through public reports or complaints, possession of at least two preliminary pieces of evidence, case conferences, and transfer of the case to the Prosecutor's Office for prosecution before the Court. The cases involving the victims were purely acts of extortion; the justification of paying a so-called "customary fine" used by certain individuals was not part of customary law enforcement, as its sole purpose was to obtain money through extortion. (2) The inhibiting factors include poor implementation by law enforcement officers, cultural misinterpretation of propriety norms and Minangkabau customs leading to extortion under the guise of "customary fines" being perceived as acceptable and lack of public awareness to report such crimes. (3) Police efforts consist of preventive measures such as patrols, public education, consultation counters, deployment of community police officers (Bhabinkamtibmas), and cooperation with organizations and institutions, as well as repressive measures through investigation and inquiry in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Police Law, including detention of perpetrators to ensure the legal process proceeds.

Keywords : Law Enforcement, Criminal Act of Extortion, Indecent Act, Pauh Sector Police